



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 13316-13324

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pendidikan Etika dan Kesadaran Digital: Sebuah Kajian Literatur Tentang Etika Bermedia Sosial Di Era Inovasi Artificial Intelligence

<sup>1</sup>Arum Pandan Sari, <sup>2</sup>Bernardus Agus Rukiyanto, <sup>3</sup>Khaerul, <sup>4</sup>Asri Ady Bakri, <sup>5</sup>Iwan Ridwan

<sup>1</sup>Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Gunadarma,

<sup>2</sup>Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma,

<sup>3</sup>Prodi Manajemen, Fakultas Bisnis, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada,

<sup>4</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia,

<sup>5</sup>Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

[larumpandansari@staff.gunadarma.ac.id](mailto:larumpandansari@staff.gunadarma.ac.id), [rukysi@gmail.com](mailto:rukysi@gmail.com), [khaerulmakuring93@gmail.com](mailto:khaerulmakuring93@gmail.com),

[asriadv.bakri@umi.ac.id](mailto:asriadv.bakri@umi.ac.id), [iwanridwan@untirta.ac.id](mailto:iwanridwan@untirta.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan bentuk pendidikan etika serta kesadaran digital dalam konteks penggunaan media sosial di era inovasi Artificial Intelligence (AI). Fokus kajian adalah untuk mengidentifikasi tantangan etika baru yang muncul dari integrasi AI di platform media sosial dan merumuskan kerangka pendidikan yang relevan untuk membangun literasi digital yang bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur sistematis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi AI memperuncing masalah etika bermedia sosial, seperti disinformasi yang terpersonalisasi, bias algoritma, pelanggaran privasi data, dan manipulasi psikologis. Kajian ini mengonfirmasi bahwa pendidikan etika digital konvensional tidak lagi memadai. Diperlukan pendekatan pendidikan yang proaktif dan adaptif, menekankan pada pemahaman kritis terhadap cara kerja algoritma, nilai privasi, keaslian identitas digital, serta tanggung jawab moral dalam berinteraksi di ruang yang telah dimediasi AI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi pendidikan etika dan kesadaran digital berbasis AI menjadi kebutuhan mendesak dalam kurikulum formal dan non-formal untuk membentuk pengguna media sosial yang cakap dan berintegritas di era disruptif ini. Untuk mewujudkan pendekatan pendidikan yang adaptif tersebut, diperlukan kolaborasi multidimensional antara pemerintah, institusi pendidikan, perusahaan teknologi, dan komunitas. Kurikulum perlu dirancang secara dinamis, tidak hanya menyajikan teori tetapi juga simulasi interaksi dengan lingkungan digital berbasis AI, seperti praktik mengidentifikasi deepfake, menganalisis bias algoritma rekomendasi, atau menilai implikasi etis dari penyebaran data pribadi.*

**Kata Kunci:** Pendidikan Etika, Kesadaran Digital, Inovasi Artificial Intelligences

### Pembahasan

Perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, telah merekonstruksi cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi. Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X (sebelumnya Twitter) telah menjadi ruang publik baru yang melampaui batas geografis dan waktu. Data terbaru dari We Are Social pada 2024 menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 5,04 miliar pengguna internet global, dengan sekitar 4,76 miliar di antaranya adalah pengguna media sosial aktif, yang menghabiskan rata-rata 2 jam 23 menit per hari di platform tersebut (Ardhana *et al.*, 2025). Fenomena ini tidak hanya mendemokratisasi informasi tetapi juga menciptakan kompleksitas baru dalam tata kelola interaksi sosial, di mana norma-norma etika konvensional seringkali tertinggal atau tidak sepenuhnya dapat diterapkan.

Tantangan etika klasik di media sosial, seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, ujaran kebencian, dan erosi privasi, telah menjadi kajian luas dalam dekade terakhir. Namun, lanskap permasalahan ini mengalami transformasi yang luar biasa cepat dan masif dengan hadirnya inovasi Artificial Intelligence (AI). AI tidak lagi hanya menjadi alat di balik layar, tetapi telah menjadi arsitek aktif yang membentuk pengalaman pengguna. Algoritma rekomendasi yang mendorong konten, chatbot yang mensimulasikan percakapan manusia, hingga teknologi deepfake yang mampu memanipulasi audio-visual dengan nyaris sempurna, telah mengaburkan batas antara realitas dan rekayasa, antara otentisitas dan automasi.

Integrasi AI dalam media sosial telah memunculkan paradoks. Di satu sisi, AI menawarkan personalisasi dan efisiensi, seperti filter yang menghibur atau merekomendasikan konten yang sesuai minat. Di sisi lain, AI menjadi motor penggerak dari masalah etika yang lebih sistemik dan sulit dideteksi. Misalnya, algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna (engagement) secara tidak sadar cenderung mempromosikan konten yang provokatif, emosional, atau polarisasi, seperti yang diungkapkan dalam kasus Facebook Files yang diungkap oleh Frances Haugen pada 2021. Hal ini menciptakan "ruang gema" (echo chamber) dan filter bubble yang memperkuat prasangka dan memecah belah masyarakat.

Masalah privasi dan eksploitasi data mencapai dimensi yang mengkhawatirkan dengan kemampuan AI (Soemarno, 2023). Setiap interaksi, like, scroll, dan waktu tonton dianalisis untuk melatih model AI yang tidak hanya mengenali pola perilaku, tetapi juga memprediksi dan bahkan memengaruhi keputusan pengguna. Laporan European Data Protection Board (EDPB) menyoroti risiko profiling berbasis AI yang dapat digunakan untuk manipulasi politik atau eksploitasi ekonomi, menyerang otonomi individu. Di Indonesia, riset oleh SAFEnet mencatat peningkatan pelanggaran hak digital, di mana banyak warga yang tidak menyadari bagaimana data pribadinya dikumpulkan dan dimanfaatkan oleh algoritma.

Salah satu manifestasi paling nyata dari tantangan etika baru ini adalah maraknya disinformasi dan misinformasi yang diproduksi atau diperkuat oleh AI. Teknologi Generative AI seperti ChatGPT, DALL-E, atau Midjourney memungkinkan penciptaan teks, gambar, dan video palsu yang sangat meyakinkan dalam skala besar dan waktu singkat. Partnership on AI mencatat, pada 2023, 85% ahli menyatakan kekhawatiran bahwa AI-generated content akan memperparah misinformasi. Deepfake, misalnya, telah digunakan untuk membuat video palsu figur publik, berpotensi merusak reputasi, memengaruhi pasar keuangan, atau mengganggu proses demokrasi.

Lebih dalam lagi, inovasi AI mengangkat isu bias dan diskriminasi sistemik. Model AI dilatih dengan data masif dari dunia nyata yang tidak lepas dari prasangka sosial, budaya, dan historis. Akibatnya, algoritma dapat memperkuat stereotip, seperti bias gender atau ras dalam sistem iklan target (targeted advertising) atau dalam moderasi konten otomatis. UNESCO dalam laporannya tahun 2023 memperingatkan bahwa bias algoritmik dapat mengikis hak asasi manusia dan memperlebar ketidaksetaraan jika tidak dikelola dengan etis.

Di tengah kompleksitas ini, kesenjangan antara kecepatan inovasi teknologi dan kedewasaan pengguna dalam menyikisnya terasa sangat lebar (Ambardi *et al.*, 2025). Mayoritas literasi digital yang ada masih berfokus pada aspek keterampilan operasional (technical skill) dan keamanan dasar (seperti membuat kata sandi kuat). Sementara itu, literasi etika digital pemahaman kritis tentang dampak moral, sosial, dan politik dari teknologi yang digunakan masih sangat terbatas. Survei Digital Civility Index oleh Microsoft menunjukkan bahwa netiket dan saling menghormati di ruang digital justru mengalami penurunan di banyak negara.

Pendidikan formal pun sering kali belum mampu mengimbangi perubahan ini. Kurikulum pendidikan di banyak negara, termasuk Indonesia, belum secara komprehensif mengintegrasikan pendidikan etika digital yang kontekstual dengan era AI. Pendidikan karakter dan PKn masih berkuat pada ranah etika analog, sementara dunia yang dihadapi siswa adalah dunia digital yang kompleks. Akibatnya, generasi digital native mungkin cakap secara teknis, tetapi rentan secara etis dan kritis dalam menghadapi manipulasi algoritmik. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan etika dan kesadaran digital yang lama menjadi tidak lagi memadai. Diperlukan rekonstruksi pendekatan yang tidak hanya menekankan "apa yang tidak boleh dilakukan" (larangan), tetapi juga membangun kesadaran kritis tentang "bagaimana sistem bekerja" dan "mengapa etika menjadi penting". Pendidikan harus mampu membekali individu dengan kemampuan untuk mempertanyakan alasan di balik rekomendasi konten, memahami nilai ekonomi dari data pribadi mereka, mengenali konten hasil generatif AI, dan menyadari tanggung jawab kolektif dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat.

Berdasarkan urgensi inilah, penelitian ini dilakukan. Kajian literatur ini bertujuan untuk memetakan tantangan etika bermedia sosial yang diperparah oleh inovasi AI dan mengeksplorasi konsep serta kerangka pendidikan etika dan kesadaran digital yang relevan dan adaptif. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan landasan teoretis bagi pengembangan model pendidikan yang mampu membentuk pengguna media sosial yang tidak hanya cerdas digital, tetapi juga beretika, kritis, dan resilien di tengah gempuran kecerdasan buatan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur sistematis (systematic literature review) dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis, mensintesis, dan memetakan konsep-konsep utama terkait pendidikan

etika digital dalam konteks media sosial yang dipengaruhi inovasi Artificial Intelligence (AI). Tahap pertama penelitian melibatkan identifikasi dan pengumpulan sumber literatur primer dan sekunder yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah bereputasi, prosiding konferensi internasional, buku, serta laporan kebijakan dari lembaga terpercaya (contohnya UNESCO, IEEE, dan Partnership on AI). Pencarian dilakukan secara elektronik melalui database akademik (Google Scholar, ScienceDirect, Scopus) dengan kata kunci utama seperti "digital ethics education", "social media ethics", "AI algorithm literacy", "algorithmic bias", dan "digital citizenship in AI era". Kriteria inklusi mencakup publikasi dalam rentang waktu 2018-2024 untuk memastikan relevansi dengan perkembangan AI mutakhir, serta fokus pada aspek pendidikan, etika, dan kesadaran digital. Pada tahap berikutnya, data yang terkumpul dianalisis secara tematik (thematic analysis) untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan solusi yang muncul dalam literatur. Proses ini meliputi pengkodean (coding) data, pengelompokan kode menjadi tema-tema substansial, dan penarikan interpretasi secara kritis. Sintesis dilakukan dengan membandingkan dan mempertentangkan temuan dari berbagai sumber untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan objektif. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai jenis literatur dan perspektif penulis. Melalui metode ini, penelitian berupaya menjawab pertanyaan penelitian dengan merumuskan kerangka konseptual yang solid mengenai urgensi dan bentuk pendidikan etika serta kesadaran digital yang responsif terhadap dinamika media sosial di era AI.

## **Pembahasan**

### **Kajian Teoritik Pendidikan Etika**

Pendidikan etika, sebagai disiplin yang bertujuan membentuk karakter moral dan kemampuan pertimbangan baik-buruk, telah dikembangkan oleh banyak pemikir dengan landasan filosofis yang beragam (Rosidin *et al.*, 2025). Salah satu teori paling berpengaruh berasal dari Lawrence Kohlberg dengan Theory of Moral Development-nya yang bersifat kognitif-evolutif. Kohlberg berargumen bahwa perkembangan moral individu berjalan melalui enam tahap universal yang terbagi dalam tiga level: pra-konvensional (moralitas berdasarkan imbalan/hukuman), konvensional (moralitas berdasarkan norma sosial dan hukum), dan pasca-konvensional (moralitas berdasarkan prinsip etika universal). Teori ini menekankan bahwa pendidikan etika harus berfungsi sebagai stimulan kognitif dengan menyajikan dilema moral yang memaksa individu untuk berpikir pada tahap yang lebih tinggi, sehingga membantu mereka naik dari pertimbangan yang egosentris menuju pertimbangan yang berlandaskan keadilan dan hak asasi.

Berbeda dengan pendekatan kognitif Kohlberg, Carol Gilligan mengkritik teori tersebut karena dianggap terlalu berpusat pada nilai keadilan (ethics of justice) yang maskulin dan mengabaikan dimensi kepedulian (ethics of care) yang sering diasosiasikan dengan sosialisasi perempuan (Widiarti, 2003). Gilligan dalam karya monumentalnya, *In a Different Voice*, menyatakan bahwa perkembangan moral juga berjalan melalui tahap orientasi pada diri sendiri, tanggung jawab terhadap orang lain, hingga pemahaman bahwa hubungan saling peduli adalah dasar etika. Pendidikan etika dalam perspektif ini tidak hanya tentang menyelesaikan dilema dengan prinsip abstrak, tetapi juga tentang mengasah sensitivitas, empati, dan tanggung jawab dalam relasi konkret dengan sesama. Teori ini sangat relevan dalam konteks digital, di mana interaksi seringkali kehilangan nuansa manusiawi dan empati.

Sementara itu, pendekatan kebajikan (virtue ethics) yang bersumber dari pemikiran Aristoteles menawarkan perspektif yang berbeda lagi. Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* berfokus pada pembentukan karakter (hexis) yang baik melalui kebiasaan (habituation) dan praktik yang terus-menerus. Tujuan akhirnya adalah mencapai eudaimonia (kehidupan yang sejahtera dan bermakna) dengan menjalankan kebajikan (aretē) seperti keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan sebagai jalan tengah antara dua ekstrem yang buruk. Pendidikan etika ala Aristoteles bukan sekadar mengajarkan aturan, tetapi membina kebiasaan bertindak baik dalam komunitas praktik. Dalam konteks modern, ini berarti menciptakan kultur digital di mana kebajikan seperti kejujuran, rasa hormat, dan keberanian sipil (civic courage) dipraktikkan dan dihargai.

Memasuki abad ke-20, John Dewey, tokoh pendidikan progresif, menawarkan teori pendidikan etika yang bersifat pragmatis dan demokratis (Muzeliati, Firdaus and Sumianto, 2025). Bagi Dewey, etika bukanlah seperangkat dogma yang diajarkan, melainkan hasil dari refleksi pengalaman dan penyelesaian masalah dalam komunitas demokratis. Pendidikan moral terjadi melalui partisipasi aktif dalam kehidupan sosial sekolah yang merupakan miniatur masyarakat. Dewey menekankan pentingnya metode penyelidikan (inquiry) dan diskusi reflektif atas pengalaman nyata. Konsep ini sangat aplikatif untuk pendidikan etika digital, di mana peserta didik perlu diajak menyelidiki dan merefleksikan dampak nyata dari tindakan mereka di media sosial, seperti penyebaran informasi atau interaksi daring, dalam sebuah "komunitas penyelidik".

Pendekatan lain yang sangat relevan dengan era digital datang dari Nel Noddings dengan Ethics of Care yang ia kembangkan lebih lanjut. Noddings menekankan bahwa fondasi moral terletak pada hubungan alami manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan perhatian (caring). Pendidikan etika, menurutnya, harus berpusat pada pemodelan (modelling), dialog (dialogue), praktik (practice), dan konfirmasi (confirmation). Pendidik bertindak sebagai caregiver yang memodelkan kepedulian, mendorong dialog tentang perasaan dan kebutuhan, memberikan kesempatan praktik merawat, serta mengonfirmasi kebaikan dalam diri peserta didik. Dalam dunia digital yang sering kali impersonal, teori ini mengingatkan pentingnya membangun kembali hubungan saling peduli dan tanggung jawab sebagai basis etika berkomunikasi.

Di ranah yang lebih kontemporer, Michel Foucault memberikan perspektif kritis tentang pendidikan etika melalui konsep technologies of the self (Iqbal, 2024). Foucault melihat etika sebagai praktik kebebasan dan bentuk pembentukan diri (self-formation) di mana individu secara aktif mengubah dirinya menjadi subjek moral. Proses ini melibatkan hubungan dengan aturan, mode pengetahuan, dan bentuk subjektivitas yang dominan dalam suatu masyarakat. Pendidikan etika dari perspektif Foucauldian adalah proses untuk membongkar kuasa yang melekat dalam wacana dan teknologi (termasuk teknologi digital), serta memberdayakan individu untuk mendefinisikan dan mengatur dirinya sendiri secara etis. Dalam konteks media sosial, ini berarti mengembangkan kesadaran kritis terhadap bagaimana algoritma dan platform membentuk perilaku dan keinginan kita, lalu mengambil alih kendali atas proses pembentukan diri tersebut.

Teori Jurgen Habermas tentang Discourse Ethics menawarkan landasan untuk etika dalam masyarakat yang majemuk (BATU *et al.*, 2024). Habermas berargumen bahwa norma hanya dapat dianggap sah jika semua pihak yang terkena dampaknya dapat menyetujuinya dalam situasi diskursif yang ideal, yaitu dialog yang bebas dari paksaan dan setara. Prinsip utamanya adalah inklusivitas, kesetaraan partisipasi, dan kekuatan argumen yang lebih baik (force of the better argument). Pendidikan etika berdasarkan teori ini akan berfokus pada pengembangan kompetensi komunikatif untuk berpartisipasi dalam diskursus publik yang rasional dan inklusif. Di era media sosial, ini menjadi sangat penting namun juga penuh tantangan, karena platform sering kali menjadi ruang untuk monolog atau debat yang penuh celaan, bukan diskursus yang ideal.

Pendekatan integratif ditawarkan oleh James Rest melalui Four-Component Model of Morality. Rest mengidentifikasi empat proses psikologis yang harus berfungsi untuk menghasilkan perilaku moral: 1) Moral Sensitivity (kepekaan untuk mengenali situasi moral), 2) Moral Judgment (penilaian tentang tindakan apa yang benar), 3) Moral Motivation (prioritasi nilai moral di atas nilai lain), dan 4) Moral Character (keteguhan untuk melaksanakan tindakan moral). Model ini pragmatis karena mengakui bahwa kegagalan moral dapat terjadi di salah satu komponen. Pendidikan etika yang efektif, oleh karena itu, harus secara holistik melatih keempat komponen ini, tidak hanya berfokus pada penalaran (Kohlberg) atau karakter (Aristoteles) saja. Model Rest sangat berguna untuk merancang kurikulum etika digital yang komprehensif.

Akhirnya, dalam konteks dunia yang terhubung secara global, Martha Nussbaum dan Amartya Sen dengan pendekatan Capabilities Approach memberikan kerangka yang berorientasi pada pengembangan manusia (Iswahyudi and Asnawi, 2024). Etika dan pendidikan, dalam pandangan ini, bertujuan untuk memperluas capabilities (kebebasan substantif) individu untuk hidup sesuai dengan nilai yang mereka pilih. Pendidikan etika harus memungkinkan seseorang untuk berpikir kritis, berempati, dan menjadi warga dunia yang tercerahkan (Kobandaha *et al.*, 2024). Nussbaum secara khusus menekankan pendidikan humaniora untuk mengembangkan imajinasi naratif dan empati. Dalam dunia digital, pendekatan ini mengarah pada pendidikan yang membekali individu dengan kemampuan untuk menavigasi kompleksitas informasi, berelasi dengan keberagaman, dan menggunakan teknologi untuk memperluas kebebasan manusia, bukan membatasinya.

Dari beragam teori tersebut, terlihat bahwa pendidikan etika bukanlah bidang yang monolitik. Ia merupakan sintesis dari pengembangan kognitif (Kohlberg), afeksi dan relasi (Gilligan, Noddings), karakter dan kebiasaan (Aristoteles), refleksi pengalaman (Dewey), kesadaran kritis (Foucault), kompetensi diskursif (Habermas), proses psikologis yang komprehensif (Rest), hingga perluasan kebebasan manusia (Nussbaum/Sen) (Annas, 2017). Sebuah kerangka pendidikan etika digital yang efektif untuk era AI perlu secara selektif mengintegrasikan wawasan dari berbagai teori ini, menciptakan pendekatan yang tidak hanya mengasah nalar, tetapi juga memelihara empati, membangun karakter, memberdayakan refleksi kritis, dan membekali keterampilan untuk bertindak secara etis dalam ekosistem digital yang kompleks dan terus berubah.

## Diskursus Kesadaran Digital Era Artificial Intelligences

Kesadaran digital di era Artificial Intelligence (AI) telah berevolusi dari sekadar kompetensi teknis menuju sebuah imperatif kritis yang kompleks dan multidimensi (Irayanti *et al.*, 2026). Jika sebelumnya literasi digital berfokus pada kemampuan operasional seperti menggunakan perangkat lunak dan menghindari penipuan daring, era AI menuntut pemahaman yang jauh lebih dalam tentang mesin yang mengatur aliran informasi, membentuk preferensi, dan bahkan mempengaruhi keputusan kolektif kita. Data dari UNESCO dalam laporan tahun 2023, "Kecerdasan Buatan dan Pendidikan", menegaskan bahwa lebih dari 85% negara yang disurvei belum memiliki kurikulum formal yang mengintegrasikan literasi tentang AI, menciptakan kesenjangan pemahaman yang besar antara kekuatan teknologi dan kewargaan digital masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari 5.16 miliar pengguna internet global berinteraksi dengan sistem AI tanpa pemahaman mendasar tentang cara kerjanya.

Dalam diskursus kontemporer, kesadaran digital kini sangat erat kaitannya dengan konsep "Literasi Algoritmik" (Algorithmic Literacy). Ini adalah kemampuan untuk memahami, mempertanyakan, dan mengkritisi logika di balik algoritma rekomendasi yang mendominasi platform media sosial, mesin pencari, dan layanan streaming. Sebuah studi besar-besaran yang diterbitkan dalam *Nature Human Behaviour* pada 2022 mengungkap bahwa algoritma di platform seperti YouTube dan TikTok mampu mengubah preferensi politik pengguna hanya dalam waktu dua minggu melalui paparan konten yang selektif dan terpersonalisasi. Kesadaran akan hal ini berarti menyadari bahwa feed media sosial kita bukanlah cerminan dunia yang objektif, melainkan konstruksi yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan (engagement), seringkali dengan memanfaatkan bias kognitif dan emosi kita.

Aspek krusial lain dari kesadaran digital era AI adalah pemahaman tentang ekonomi data dan privasi (Judijanto *et al.*, 2024). Setiap klik, tayangan, lokasi, dan bahkan jeda saat menonton adalah komoditas berharga yang digunakan untuk melatih model AI yang semakin canggih. Laporan Data Privacy Benchmark Study 2024 oleh Cisco menunjukkan bahwa 90% konsumen global peduli dengan privasi data mereka, namun hanya 32% yang merasa dapat secara efektif melindunginya. Paradoks ini menggambarkan jurang antara kesadaran abstrak dan kapasitas tindakan nyata. Kesadaran digital yang sejati harus mencakup pemahaman tentang nilai ekonomi data pribadi, implikasi dari persetujuan (consent) yang sering kita berikan tanpa baca, serta pengetahuan tentang alat dan regulasi (seperti GDPR di Eropa atau UU PDP di Indonesia) yang dapat digunakan untuk melindungi otonomi digital.

Diskursus ini juga harus menyentuh tantangan keaslian dan disinformasi yang diperparah AI (Nurdin and Nugraha, 2025). Dengan maraknya Generative AI (seperti ChatGPT, DALL-E, Midjourney), batas antara konten buatan manusia dan mesin menjadi kabur. Laporan AI Index 2024 dari Stanford University mencatat bahwa kemampuan AI generatif dalam meniru tulisan manusia telah melampaui tingkat pemahaman rata-rata manusia dalam beberapa tes. Fakta bahwa deepfake audio dan video dapat dibuat dengan mudah oleh aplikasi konsumen menciptakan krisis kepercayaan epistemik. Kesadaran digital kini berarti memiliki kecurigaan sehat (healthy skepticism) dan kemampuan untuk melakukan fact-checking secara lateral—memverifikasi sumber di luar konten yang diterima—serta mengenali tanda-tanda halus dari konten hasil generasi AI.

Lebih dalam lagi, kesadaran digital harus mencakup pemahaman kritis tentang bias dan ketidakadilan sistemik yang tertanam dalam AI (Tumanggor and Sazali, 2025). Sistem AI belajar dari data historis yang penuh dengan bias sosial manusia. Riset dari MIT dan Microsoft menemukan bahwa sistem pengenalan wajah memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi untuk perempuan dengan kulit gelap. Algoritma perekrutan otomatis dapat mendiskriminasi kandidat berdasarkan gender atau latar belakang. Kesadaran akan hal ini mengharuskan kita untuk tidak memandang AI sebagai entitas yang netral dan objektif, tetapi sebagai produk budaya dan sejarah yang dapat melanggengkan ketidaksetaraan. Ini adalah fondasi untuk menuntut akuntabilitas dan transparansi (algorithmic accountability) dari pengembang platform dan regulator.

Di tingkat kolektif, kesadaran digital berevolusi menjadi konsep "Kewargaan Digital Demokratis" (Democratic Digital Citizenship). Dalam konteks di mana ruang publik banyak bermigrasi ke platform yang dikendalikan perusahaan swasta dengan algoritma tertutup, partisipasi demokratis memerlukan pemahaman baru. Laporan The Economist Intelligence Unit 2023 menunjukkan bahwa 65% negara mengalami penurunan kualitas debat publik di media sosial, yang dikaitkan dengan algoritma yang mendorong polarisasi. Kewargaan digital yang bertanggung jawab berarti memahami bagaimana ruang digital mempengaruhi opini publik, proses politik, dan kohesi sosial, serta berpartisipasi aktif dalam mendorong tata kelola platform yang lebih etis dan transparan.

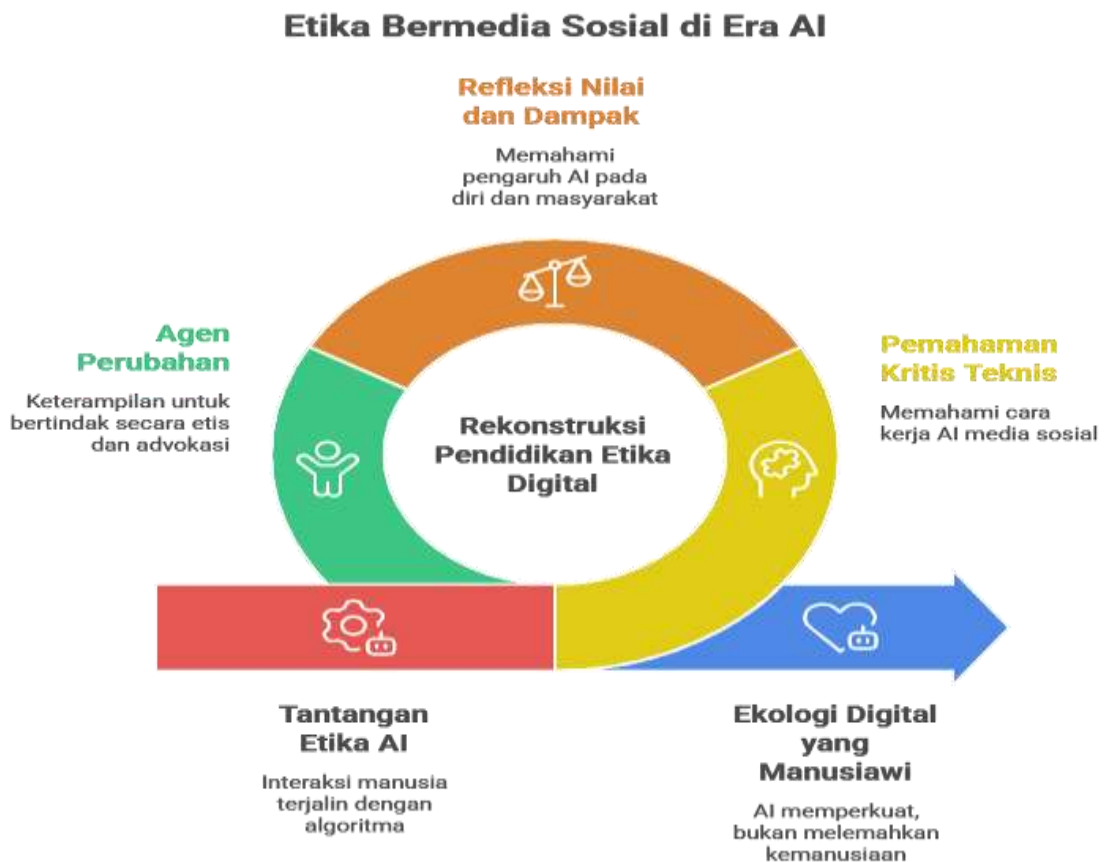
Tantangan berikutnya adalah kesenjangan kesadaran yang melebar antar generasi dan kelompok sosial. Generasi digital native (Generasi Z dan Alpha) mungkin sangat mahir secara teknis, tetapi penelitian dari Pew Research Center (2023) menunjukkan mereka justru lebih rentan terhadap kecemasan digital, tekanan untuk curated identity, dan eksploitasi data. Sementara itu, generasi yang lebih tua mungkin kesulitan mengidentifikasi konten deepfake atau manipulasi digital. Di sisi lain, kesenjangan global sangat nyata: diskursus dan regulasi AI didominasi oleh AS, Tiongkok, dan Uni Eropa, sementara negara-negara Global South sering menjadi "laboratorium uji coba" dan penyedia data mentah tanpa memiliki kontrol penuh atas teknologi tersebut.

Oleh karena itu, konstruksi kesadaran digital di era ini tidak dapat lagi bersifat individualistik, tetapi harus menjadi proyek sosial dan edukasi kolektif. Negara, institusi pendidikan, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil harus berkolaborasi. Pendidikan formal dari tingkat dasar hingga tinggi perlu mengintegrasikan kurikulum literasi AI dan etika digital yang kontekstual, bukan sebagai mata pelajaran tambahan, tetapi sebagai lensa yang menyilangi semua disiplin ilmu. Inisiatif seperti The AI Education Project di AS atau Elements of AI di Finlandia menunjukkan bagaimana konsep kompleks dapat diajarkan secara inklusif.

### Etika Bermedia Sosial di Era Artificial Intelligences

Etika bermedia sosial di era Artificial Intelligence (AI) telah bergeser dari sekadar etiket individu menuju sebuah tanggung jawab kolektif yang kompleks, di mana interaksi manusia terjalin dengan logika algoritmik yang seringkali tak kasat mata. Penelitian terbaru dari Oxford Internet Institute (2023) mengonfirmasi bahwa lebih dari 70% konten yang dikonsumsi pengguna platform besar seperti Facebook, Instagram, dan TikTok telah melalui kurasi algoritma AI yang dirancang untuk memaksimalkan engagement (Zuhri *et al.*, 2026). Fakta ini menciptakan tantangan etika paradoks: keputusan moral individu (seperti memilih untuk menyebarkan informasi atau tidak) kini sangat dipengaruhi oleh sistem yang didorong insentif ekonomi, bukan semata nilai-nilai sosial. Hal ini memerlukan kerangka etika baru yang responsif. Berikut matrix hasil penelitian.

#### 1.1 Matrix Hasil Penelitian



Aspek pertama yang mendapat sorotan tajam dari para peneliti adalah degradasi kebenaran dan epistemik publik. Studi longitudinal dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang diterbitkan dalam *Science* menunjukkan bahwa informasi palsu (misinformation) yang disebar oleh bot AI dan akun yang dimanipulasi algoritma menyebar 6 kali lebih cepat dan lebih luas daripada informasi faktual. AI generatif (seperti ChatGPT atau Midjourney) memperparah masalah ini dengan memproduksi konten persuasif dan tampak otoritatif dalam skala massal. Penelitian dari Universitas Stanford dalam laporan AI Index 2024 menemukan bahwa 52% konten deepfake yang dianalisis bersifat politis dan dirancang untuk memanipulasi opini publik. Ini menempatkan tanggung jawab etis baru pada pengguna: untuk menjadi gatekeeper pertama yang kritis dan verifikasi sebelum membagikan konten.

Kedua, pelanggaran privasi dan eksploitasi data mencapai skala dan kecanggihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penelitian dari Carnegie Mellon University (2023) mengungkap bagaimana algoritma inferensi AI dapat menyimpulkan data sensitif pengguna seperti orientasi politik, kondisi kesehatan mental, atau sifat kepribadian dari data perilaku pasif yang tampak biasa, seperti waktu scroll, kecepatan mengetik, atau pola "like" (Justam *et al.*, no date). Dalam konteks ini, persetujuan (informed consent) menjadi konsep yang hampir usang, karena pengguna tidak mungkin memahami seluruh implikasi dari data yang mereka berikan. Etika bermedia sosial, menurut analisis Universitas Harvard dalam Berkman Klein Center Report, kini harus mencakup advokasi untuk hak data (data rights) dan kesadaran untuk membatasi jejak digital secara proaktif.

Ketiga, amplifikasi bias dan diskriminasi algoritmik menjadi isu keadilan sosial yang mendesak. Penelitian dari University of California, Berkeley menunjukkan bahwa algoritma iklan di media sosial dapat secara tidak adil membatasi kesempatan kerja (opportunity filtering) dengan menargetkan lowongan berbayar hanya pada demografi tertentu, seperti pria untuk posisi teknisi bergaji tinggi. Sementara itu, riset dari Institut Teknologi Bandung (ITB) di Indonesia (2023) menemukan bias serupa dalam algoritma rekomendasi konten lokal yang cenderung memperkuat stereotip budaya dan agama tertentu (Pulungan, 2023). Etika penggunaan menuntut pengguna untuk tidak hanya pasif menerima rekomendasi, tetapi secara aktif mencari perspektif yang beragam dan mempertanyakan bias yang mungkin tersembunyi.

Keempat, erosi otonomi dan agensi manusia menjadi pokok bahasan filsafat teknologi kontemporer. Peneliti dari University of Amsterdam dalam jurnal *Big Data & Society* (2023) menganalisis bagaimana persuasive AI (Gusri, Efendi and Zalnur, 2025). AI yang dirancang untuk mengubah sikap dan perilaku di media sosial secara halus membentuk preferensi konsumsi, pandangan politik, bahkan emosi pengguna. Studi eksperimental mereka menunjukkan bahwa perubahan mood pengguna dapat diinduksi melalui manipulasi urutan konten di feed tanpa disadari. Oleh karena itu, prinsip etika otonomi, yang merupakan inti dari banyak teori moral, terancam. Etika bermedia sosial kini termasuk upaya sadar untuk merebut kembali kendali kognitif, misalnya dengan secara berkala membersihkan riwayat pelacakan atau menggunakan platform alternatif yang minim pelacakan.

Kelima, akuntabilitas yang terdistribusi dan kabur menciptakan kekosongan tanggung jawab. Ketika terjadi pelanggaran etika seperti kasus cyberbullying yang dipicu oleh rekomendasi konten negatif atau penyebaran deepfake sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab: apakah pengguna pembuat, platform sebagai penghosting algoritma, atau pengembang AI? Laporan riset dari Centre for Digital Ethics, University of Melbourne (2024) mengusulkan kerangka "Layered Accountability" di mana tanggung jawab etis dibagi antara pengguna (untuk niat dan tindakan), platform (untuk transparansi dan desain algoritma), dan regulator (untuk penegakan standar). Ini berarti etika individu harus disertai dengan tuntutan etis terhadap korporasi dan negara.

Keenam, kesejahteraan psikologis dan kesehatan mental menjadi dimensi etika yang krusial. Penelitian longitudinal dari Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan Yale University (2023) mengaitkan penggunaan media sosial berbasis algoritma dengan peningkatan kecemasan sosial dan FoMO (Fear of Missing Out) di kalangan remaja Indonesia. Algoritma yang dirancang untuk membuat pengguna ketagihan (addictive design) mengeksploitasi kerentanan psikologis. Etika bermedia sosial, berdasarkan temuan ini, mencakup praktik "digital wellbeing" seperti menetapkan batas waktu, memmatifikasi notifikasi, dan mengkritisi perbandingan sosial yang tidak realistis yang diciptakan oleh curated feeds.

Ketujuh, transformasi ruang publik dan deliberasi demokratis sedang diuji. Penelitian dari Princeton University menganalisis bagaimana echo chambers dan filter bubbles yang diperkuat AI mempolarisasi masyarakat dan mengurangi kesempatan untuk dialog lintas perbedaan. Studi mereka menemukan bahwa

interaksi dengan bot AI yang menyamar sebagai manusia (social bot) dapat secara signifikan menggeser sentimen percakapan di Twitter terkait isu-isu pemilu. Oleh karena itu, etika bermedia sosial sebagai warga negara (digital civic ethics) menekankan kewajiban untuk keluar dari gelembung informasi, terlibat dalam diskusi yang berbasis fakta dengan pihak berseberangan, dan melindungi ruang digital dari manipulasi otomatis.

Kedelapan, implikasi etika lingkungan dan keberlanjutan mulai muncul dalam diskursus. Penelitian dari University of Massachusetts, Amherst mengungkapkan bahwa pelatihan dan operasi model AI besar (large language models) yang mendasari fitur media sosial mengonsumsi energi yang sangat besar dan meninggalkan jejak karbon signifikan. Setiap scroll, stream, dan interaksi dengan konten yang diproses AI berkontribusi pada beban ini. Etika bermedia sosial yang berkelanjutan mendorong kesadaran akan dampak ekologis ini dan memilih untuk menggunakan platform dengan efisiensi energi yang lebih baik atau mengurangi konsumsi konten yang tidak perlu.

Kesembilan, aspek lintas budaya dan global menuntut sensitivitas etika yang baru. Penelitian dari National University of Singapore (NUS) menekankan bahwa norma-norma etika seperti privasi, kebebasan berekspresi, dan konsep kebenaran sangat bervariasi antarbudaya. Namun, algoritma AI sering kali dibangun dengan nilai-nilai dan bias budaya dominan (Barat). Hal ini dapat menyebabkan konflik dan kesalahpahaman. Etika bermedia sosial di konteks global, seperti di Indonesia dengan keberagamannya, mengharuskan pengguna untuk menyadari bias kultural dalam konten yang direkomendasikan dan menghormati perbedaan norma dalam interaksi global.

Kesepuluh, riset dari berbagai perguruan tinggi tersebut pada akhirnya menuju pada kesimpulan yang sama: Diperlukan rekonstruksi pendidikan etika digital yang radikal. Peneliti dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dalam jurnalnya (2024) menawarkan model "Ethical AI Literacy" yang mengintegrasikan tiga pilar: 1) Pemahaman Kritis Teknis (bagaimana AI media sosial bekerja), 2) Refleksi Nilai dan Dampak (bagaimana AI mempengaruhi diri dan masyarakat), dan 3) Agen Perubahan (keterampilan untuk bertindak secara etis dan advokasi). Ini bukan lagi soal larangan "jangan bully" atau "jangan sebar hoaks", tetapi tentang membangun kapasitas untuk bernavigasi di dalam sistem yang kompleks, kritis terhadap desainnya, dan proaktif dalam membentuk ekologi digital yang lebih manusiawi, adil, dan bertanggung jawab. Etika bermedia sosial di era AI adalah proyek kolektif untuk memastikan bahwa kecerdasan buatan memperkuat, bukan melemahkan, kemanusiaan kita.

## Kesimpulan

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa inovasi Artificial Intelligence (AI) telah mentransformasi lanskap etika bermedia sosial secara fundamental, menggeser tantangan dari pelanggaran norma interpersonal ke ranah sistemik yang melibatkan bias algoritmik, disinformasi terpersonalisasi, krisis privasi data, dan erosi otonomi manusia. Pendidikan etika dan kesadaran digital konvensional terbukti tidak lagi memadai untuk mengatasi kompleksitas ini. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pendidikan yang integratif dan adaptif, yang tidak hanya menanamkan nilai-nilai kebajikan dan kepedulian klasik, tetapi juga membekali individu dengan literasi algoritmik kritis, pemahaman tentang ekonomi data, serta kemampuan untuk melakukan refleksi etis atas dampak teknologi dalam kehidupan demokratis. Hanya dengan pendekatan holistik yang menyinergikan aspek kognitif, afektif, dan keterampilan praktis melalui kolaborasi antara institusi pendidikan, pembuat kebijakan, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil bangsa dapat membentuk pengguna media sosial yang tidak hanya cakap digital, tetapi juga resilien, berkarakter, dan mampu menjadi agen etis yang menjaga martabat manusia di tengah arus disruptif kecerdasan buatan.

## Daftar Pustaka

1. Ambardi, K. *et al.* (2025) *Masyarakat Digital: Teknologi Kekuasaan dan Kekuasaan Teknologi*. UGM PRESS.
2. Annas, A.N. (2017) 'Manajemen Peserta Didik Berbasis Kecerdasan Spiritual Pendidikan Islam', *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), pp. 132–142.
3. Ardhana, V.Y.P. *et al.* (2025) *Strategi dan Teknologi Media Sosial*. Mega Press Nusantara.
4. BATU, M. *et al.* (2024) 'Tugas Ringkasan HAM dan Kewarganegaraan: Human Rights and Views of The Catholic Church Under Habermas Discourse Theory: Discovering Common Ground in Differences'.
5. Gusri, S., Efendi, E. and Zalnur, M. (2025) 'Perubahan Kriteria Kebenaran di Era Industri 4.0: Antara Koherensi, Korespondensi dan Pragmatisme', *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(3), pp. 472–482.
6. Iqbal, M.M. (2024) *Anatomi Pemikiran Kontemporer: Dari Foucault, Derrida, Bourdieu, & Perkembangannya*. Anak Hebat Indonesia.
7. Irayanti, I. *et al.* (2026) *Digital Citizenship: Membangun Peradaban Virtual yang Humanis dan Inklusif*. Diwan Media Pustaka.
8. Iswahyudi, I. and Asnawi, N. (2024) 'Menuju Kebijakan Sosial Berorientasi Kapabilitas: Telaah Pemikiran Amartya Sen Dan Martha Nussbaum', *Multikultura*, 3(4), p. 4.
9. Judijanto, L. *et al.* (2024) *Literasi Digital di Era Society 5.0: Panduan Cerdas Menghadapi Transformasi Digital*. PT. Sonpedia

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5646>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

---

Publishing Indonesia.

10. Justam, A.S. *et al.* (no date) 'BUKU KECERDASAN ARTIFISIAL (AI) DAN MACHINE LEARNING (ML)'
11. Kobandaha, F. *et al.* (2024) 'Dasar Pengetahuan Dan Kriteria Kebenaran Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia*, 2(14), pp. 13–19.
12. Muzeliati, M., Firdaus, M. and Sumianto, S. (2025) 'Kerinduan pada Sosok Pendidik: Upaya Membangun Relasi Edukatif yang Otentik', *Indonesian Research Journal on Education*, 5(4), pp. 103–113.
13. Nurdin, S.W. and Nugraha, I.F. (2025) 'ANCAMAN DEEPPAKE DAN DISINFORMASI BERBASIS AI: IMPLIKASI TERHADAP KEAMANAN SIBER DAN STABILITAS NASIONAL INDONESIA', *JIMR: Journal Of International Multidisciplinary Research*, 4(01), pp. 73–92.
14. Pulungan, M.K.A. (2023) 'Menjelajahi Dunia Algoritma Pemrograman: Membuka Potensi Baru Dalam Kehidupan Sehari-Hari', *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 2(2), pp. 33–39.
15. Rosidin, M.P.I. *et al.* (2025) *Pendidikan Moral Dan Etika: Membentuk Generasi Berintegrasi*. PT. Nawala Gama Education.
16. Soemarmo, A.M. (2023) 'Masalah privasi dan keamanan data pribadi pada penerapan kecerdasan buatan', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), pp. 4917–4929.
17. Tumanggor, T. and Sazali, H. (2025) 'Etika Regulasi Dan Kebijakan Media Digital: Meningkatkan Kesadaran Publik Di Era Informasi', *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(3), pp. 1657–1669.
18. Widiarti, P.W. (2003) 'Orientasi Moral Keadilan dan Orientasi Moral Kepedulian: Suatu kecenderungan perbedaan antara Penalaran Moral Laki-laki dan Perempuan Berbeda', *Cakrawala Pendidikan*, (1), p. 86530.
19. Zuhri, A. *et al.* (2026) *Jurnalistik Digital: Teori, Strategi, dan Inovasi di Era Media Baru*. Star Digital Publishing.